



Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Ketapang tahun 2010 dilaksanakan di Gedung Pancasila, Rabu (18/3) kemarin.

Musrenbang Kabupaten Ketapang 2009 ini merupakan forum musyawarah pemangku kepentingan di tingkat kabupaten dalam rangka mematangkan Rancangan Rencana Kerja Daerah (RKPD) kabupaten berdasarkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD). Dan kegiatan ini akan dilaksanakans selama dua hari.

Kegiatan ini akan menyerasikan substansi rancangan Renja dari masing-masing SKPD yang hasilnya digunakan untuk memutakhirkan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2010. Dan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Ketapang ini sebagai dasar dan pedoman dalam rangka Penyusunan RKPD yang merupakan acuan untuk penyusunan Rancangan Anggaran Pendetapan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2010.

Pemerintah provinsi Kalbar yang hadir dalam kegiatan tersebut diwakili oleh Kepala Bappeda Kalbar, Ir.H Fattan A Rasyid, MM. Sedangkan Bupati Ketapang Morkes Effendi, S.Pd, MH diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Ketapang, Drs. H. Bachtiar. Hadir pula, Plh Bappeda Ketapang, Drs. P. Devie Frantito, MM dan sejumlah Kepala SKPD seantero Ketapang dan para camat di seluruh Ketapang.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk mendapatkan masukan untuk pemutakhiran rancangan SKPD kabupaten. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan rincian rancangan awal kerangka regulasi menurut SKPD sekaligus mensinkronkan agenda program prioritas pembangunan nasional, provinsi, kabupaten dan kecamatan. Kemudian, merupakan media konsultasi public bagi segenap pemangku kepentingan untuk menetapkan program dan kegiatan daerah serta memberikan rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program Tahun Anggaran 2010.

Sementara itu, Gubernur Cornelis dalam sambutannya mengatakan bahwa proses penyusunan RKPD yang dilaksanakan mulai dari tingkat desa dan kecamatan merupakan

wujud implementasi pendekatan bottom up tersebut. Dengan pendekatan ini masyarakat memiliki kesempatan untuk menyuarakan aspirasinya dan memotret kondisi nyata kehidupan masyarakat agar dapat diakomodasikan dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan.

Di samping itu, diharapkan pula tercipta keterpaduan langkah melalui program-program pembangunan antar pemerintah kabupaten dengan pemerintah provinsi dan pusat.

Lebih jauh dikatakan Gubernur bahwa visi pembangunan daerah Kalimantan Barat Tahun 2008-2013, yaitu 'Terwujudnya Masyarakat Kalimantan Barat yang Beriman, Sehat, Cerdas, Aman, Berbudaya dan Sejahtera', telah menetapkan sasaran pembangunan daerah.

"Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat Ketapang yang telah ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan, selalu memelihara serta menjaga ketertiban dan keamanan sebagai salah satu kunci keberhasilan pembangunan," ungkap Cornelis.

Di sisi lain, pembangunan juga diharapkan meningkatkan indikator-indikator angka harapan hidup, angka melek huruf, indeks pembangunan manusia, kemampuan pendanaan APBD, penanaman modal, laju pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita masyarakat.

Sementara itu, Bupati Ketapang Morkes Effendi dalam sambutannya mengatakan bahwa Musrenbang untuk penyusunan RKPD merupakan suatu tahapan kegiatan yang harus dilaksanakan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Hal ini sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dengan dilaksanakannya Musrenbang ini, diharapkan saran, pendapat dan usulan dari semua pemangku kepentingan pembangunan atau stakeholder yang ada di Kabupaten Ketapang dapat terakomodir secara optimal. Dalam rentang waktu pelaksanaan kegiatan pembangunan tahunan, yaitu pada Tahun 2010 nanti.

Musrenbang Kabupaten Ketapang 2010

Ditulis oleh Andry
Kamis, 19 Maret 2009 09:19

Dalam kesempatan ini Bupati Morkes juga menekankan bahwa dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan di Kabupaten agar senantiasa memperhatikan mekanisme dan tahapan perencanaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Untuk itu saya mengharapkan kepada saudara-saudara agar mempedomani serta memahami peraturan dan ketentuan yang ada. Sehingga diharapkan dokumen perencanaan yang dihasilkan dapat memberikan manfaat yang maksimal serta merupakan hasil kesepakatan semua pemangku kepentingan di Kabupaten Ketapang," tukasnya.